

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan karena dengan tubuh yang sehat setiap individu mampu menjalankan segala aktivitas kehidupan dengan baik. Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, oleh karena itu agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat tercapai, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan kesehatan. Di keluarkannya Undang-Undang Nasional Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya (UU No. 40. 2004).

Undang-Undang Nasional No 40 Tahun 2004 ditetapkan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh dan memastikan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial diantaranya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini diwujudkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) . Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) . Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) merupakan sebuah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepesertaan SJSN yang dinaungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi menjadi dua, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan diperuntukkan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepesertaan JKN saat ini adalah PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Non PBI. PBI terdiri atas orang miskin dan tidak mampu serta Non PBI yang terdiri dari pekerja penerima upah dan keluarganya (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya (Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan Pekerja yang tidak termasuk PNS,

TNI, Polri dan sebagainya yang bukan penerima Upah), dan bukan pekerja dan anggota keluarganya (investor, pemberi kerja, penerima pensiun dan sebagainya) (Perpres No. 82, 2018).

Badan penyelenggara jaminan sosial menyatakan 221.835.244 jiwa penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhitung per Juli 2020. Provinsi Jawa Timur tercatat jumlah peserta sebanyak 12.148.878 (69,54%) jiwa, dan dari jumlah tersebut kepesertaan JKN di provinsi Jawa Timur di dominasi oleh segmen peserta PBI APBN sebesar 53%, dan PPU sebanyak 20%, sedangkan segmen peserta paling sedikit ditempati oleh segmen Bukan Pekerja yakni 2,9% (BPJS, 2020).

Dikutip dari berita radio Mayangkara berdasarkan perkembangan data hingga akhir Juli 2019, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar masih rendah dan menempati peringkat ketiga terbawah se-Jawa Timur. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar, baik dari Penerima Bantuan Iuran atau PBI, mandiri maupun dari Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri baru mencapai 69 persen. Padahal sesuai dengan target pemerintah, masing-masing daerah termasuk Kabupaten Blitar, 100 persen warga harus tercover Jaminan Kesehatan Nasional.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki peserta BPJS rendah, berdasarkan data kepesertaan BPJS per April 2019, jumlah peserta JKN KIS sebanyak 658.424 (53,03%) jiwa, data tersebut untuk semua segmen kepesertaan dengan jumlah penduduk 1.241.523 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kepesertaan di wilayah Kabupaten Blitar masih belum menyeluruh dan banyak yang belum tercover oleh jaminan kesehatan Nasional (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2019).

Menurut data kepesertaan dari Kantor Desa Pojok jumlah peserta PBI APBN berjumlah 721, sedangkan PBI APBD hanya berjumlah 537 dengan jumlah penduduk sebanyak 4.741 jiwa, menurut dari perangkat desa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sebanyak 62%, dengan ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN di desa Pojok.

Keikutsertaan seseorang dalam jaminan kesehatan secara mandiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa umur, pendidikan, penghasilan, persepsi dan sosialisasi berhubungan dengan kepesertaan JKN.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani mengenai faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat membayar iuran jaminan kesehatan melaporkan tingkat penghasilan masyarakat mempengaruhi kemauan masyarakat membayar iuran jaminan kesehatan. Selain penghasilan, kemauan menjadi peserta jaminan kesehatan juga berhubungan secara signifikan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap jaminan kesehatan BPJS (Widhiastuti, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Yuli Puspitasari (2016), menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah pendidikan, pengetahuan persepsi. Hasil penelitian di Universitas Andalas yang dilakukan oleh Susilo (2015), menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri adalah pengetahuan, pendidikan, pendapatan, dan askes terhadap pelayanan kesehatan.

Program JKN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian universal health coverage dan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila semua masyarakat mendaftarkan diri menjadi peserta JKN, khususnya bagi masyarakat yang tidak masuk sebagai peserta JKN PBI maupun peserta JKN non PBI pekerja penerima upah. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang dimungkinkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor penyebab rendahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di kawasan Desa Pojok Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah faktor apa saja menyebabkan rendahnya kepesertaan di kawasan desa Pojok Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar.

1.3 Tujuan Penelitian

➤ Tujuan Umum

Mengetahui faktor penyebab rendahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kawasan desa Pojok Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar.

➤ Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kepesertaan JKN di kawasan Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan dari tingkat pendidikan masyarakat yang belum menjadi peserta.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kepesertaan JKN di kawasan Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan dari tingkat pengetahuan masyarakat yang belum menjadi peserta.
3. Mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kepesertaan JKN di kawasan Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan dari tingkat persepsi masyarakat yang belum menjadi peserta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BPJS Kesehatan

Sebagai upaya mendukung tercapainya cakupan semesta 2020 dan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi bagi perangkat desa sebagai upaya peningkatan kepesertaan JKN di masyarakat

2. Bagi Program Studi D3 Asuransi Kesehatan

Sebagai bahan tambahan kajian dan pengembangan ilmu di bidang Asuransi Kesehatan khususnya mengenai kepatuhan peserta dalam membayar iuran.

3. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti serta dapat mengembangkan pengetahuan dan praktek dalam proses penelitian mengenai faktor penyebab rendahnya kepesertaan JKN.